

## Urgensi Kebijakan Kota Ramah Gender di Tanjungpinang

### *The Urgency of a Gender-friendly City Policy in Tanjungpinang*

Abdurrahman Al Haz<sup>1</sup>, Ainul Nurmadiyah<sup>2</sup>, Beki Sukmawan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondens Penulis: [ainulnurmadiyah@gmail.com](mailto:ainulnurmadiyah@gmail.com)

**Abstract.** *This Based on BPS data, it can be seen that the Gender Empowerment Index in Tanjung Pinang will reach 76.64 in 2021. This figure is quite high and has increased from the previous year. in contrast to the Riau Islands Province's gender empowerment index, which has decreased from 62.02 in 2020 to 58.91 in 2021. This shows that so far, Tanjungpinang is committed to implementing development that guarantees gender equality and justice. The research method uses secondary data. The Tanjungpinang city RPJMD is a research method that uses existing data from the Tanjungpinang city RPJMD document as the main source of information. The data is then analyzed qualitatively to find out whether the RPJMD of Tanjungpinang City has paid attention to gender aspects in its planning. Data collection techniques in this method include document studies and content analysis.*

**Keywords :** *Gender, Gender Friendly City, PUG Tanjungpinang*

**Abstrak.** Berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa indeks pemberdayaan Gender di Tanjungpinang mencapai angka 76,64 ditahun 2021. Angka ini terbilang cukup tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan indeks pemberdayaan gender Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan dari angka 62,02 ditahun 2020 menjadi 58,91 ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini Tanjungpinang berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Metode penelitian dengan menggunakan data sekunder RPJMD kota Tanjungpinang adalah metode penelitian yang menggunakan data yang telah ada dari dokumen RPJMD kota Tanjungpinang sebagai sumber informasi utama. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui apakah RPJMD kota tanjungpinang telah memperhatikan aspek gender dalam perencanaannya. Teknik pengumpulan data dalam metode ini meliputi studi dokumen dan content analysis.

**Kata kunci :** Jenis Kelamin, Kota Ramah Gender, PUG Tanjungpinang

## PENDAHULUAN

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Komitmen dunia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dengan adanya *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

(CEDAW) oleh PBB pada tahun 1979. Keadilan gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan ditingkat dunia dalam berbagai konferensi, mulai dari Konferensi Dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, sampai Konferensi di Beijing pada tahun 1995. (*pemberdayaan manusia berbasis gender, t.t.*)

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan PUG adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. (*BAPPENAS, t.t.*)

Dari 17 tujuan yang ingin dicapai, kesetaraan gender ditempatkan dalam urutan kelima yang artinya kesetaraan gender merupakan prioritas yang sangat diperhatikan dalam mewujudkan SDGs. Salah satu Target penting dalam kesetaraan gender yaitu Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun melalui indikator Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 1. Indeks Pemberdayaan Gender**

KEP. RIAU	62,02	58,97
KARIMUN	64,05	63,89
BINTAN	69,64	73,04
NATUNA	42,99	42,95
LINGGA	48,52	48,50
KEPULAUAN ANAMBAS	62,57	67,66
KOTA BATAM	59,10	58,38
KOTA TANJUNG PINANG	76,44	76,64

Source: BPS, 2021

Berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa indeks pemberdayaan Gender di Tanjungpinang mencapai angka 76,64 ditahun 2021. Angka ini terbilang cukup tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan indeks pemberdayaan gender Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan dari angka 62,02 ditahun 2020 menjadi 58,91 ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini Tanjungpinang berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagai kota dengan indeks pemberdayaan gender tertinggi di Kepulauan Riau, Tanjungpinang telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya ditahun 2021 lalu. APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pemenuhan kebutuhan anak. Tanjungpinang menjadi salah satu Kota dari 58 Kabupaten Kota di Indonesia yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori UTAMA. (dp3apm, t.t.)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) khususnya di Tanjungpinang menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. (Setiawan, 2019).

Namun, terlepas dari penilaian Berdasarkan angka-angka, dalam perencanaan strategis di Tanjungpinang Kesetaraan gender dan kebijakan kota belum sepenuhnya efektif dan memenuhi standar yang diharapkan. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya

saing. (Kurnianingsih dkk., 2022)

Kebijakan kota ramah gender di Tanjungpinang bisa dilaksanakan selaras dengan Peningkatan indikator indikator pemberdayaan gender. Selama dua tahun kebelakang data menunjukkan peningkatan indeks keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional khususnya dalam pengambilan keputusan, dan penurunan yg tidak terlalu signifikan pada indeks sumbangan pendapatan perempuan disektor pertanian dan sektor non pertanian terkhusus di Tanjungpinang.

**Tabel 2. keterlibatan perempuan di parlemen**

KEP. RIAU	11,11	8,89
KARIMUN	16,67	16,67
BINTAN	24,00	28,00
NATUNA	0,00	0,00
LINGGA	5,00	5,00
KEPULAUAN ANAMBAS	15,00	20,00
KOTA BATAM	8,00	8,00
KOTA TANJUNG PINANG	36,67	36,67

Source: BPS, 2021

Keterlibatan perempuan di parlemen di kota tanjungpinang pada tahun 2021 terbilang cukup tinggi mencapai angka 36,67. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat. Kebijakan perempuan adalah pekerjaan perbaikan, sedangkan pengarusutamaan gender adalah suatu pencegahan (BBC News Indonesia, t.t.)

**Tabel 3. perempuan tenaga profesional**

KEP. RIAU	46,12	47,79
KARIMUN	53,95	48,26
BINTAN	54,03	49,44
NATUNA	46,35	51,11
LINGGA	55,53	54,55
KEPULAUAN ANAMBAS	45,09	47,42
KOTA BATAM	44,54	47,64
KOTA TANJUNG PINANG	43,00	44,23

Source: BPS, 2021

Data menunjukkan peningkatan pada indeks di Tanjungpinang khususnya dan Kepulauan Riau. Hal ini akan menciptakan ruang baru bagi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada perspektif perempuan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

**Tabel 4 sumbangan pendapatan perempuan**

KEP. RIAU	28,83	28,71
KARIMUN	25,58	25,05
BINTAN	24,28	24,15
NATUNA	24,50	24,30
LINGGA	23,16	22,91
KEPULAUAN ANAMBAS	26,08	26,31
KOTA BATAM	29,55	29,62
KOTA TANJUNG PINANG	27,19	27,12

Source: BPS, 2021

Meskipun tidak signifikan namun data menunjukkan bahwa masih rendahnya peran perempuan dalam menyumbangkan pendapatan yang artinya masih adanya kesenjangan upah pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan laki-laki serta rendahnya minat berwirausaha perempuan untuk menambah pendapatan.

**Tabel 5. jumlah kasus kekerasan provinsi Kepulauan Riau**



Source: KEMENPPPA, 2022

Ditahun 2022 data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

Republik Indonesia menunjukkan Tanjungpinang memiliki total jumlah kasus kekerasan sebanyak 92 kasus dari total 339 kasus di Kepulauan Riau hingga ditahun 2022. Meskipun berdasarkan Laporan kinerja DP3APM ditahun 2019 penanganan perempuan korban kekerasan mencapai 100%, rasio perempuan korban kekerasan harusnya bisa berkurang signifikan apabila kebijakan yang dibuat searah dengan kepentingan terhadap perlindungan perempuan.

Pada penelitian sebelumnya, Penelitian tentang gender di Kota Tanjungpinang lebih difokuskan pada Evaluasi Formatif pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ada penelitian yang membahas tentang analisis antar organisasi dalam implementasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di kota Tanjungpinang, penelitian yang memfokuskan pada perspektif analisis indeks pemberdayaan gender Kota Tanjungpinang pada masa pandemi Covid-19. Maka penelitian kali ini penulis tertarik memfokuskan pada kebijakan kota ramah gender di Tanjungpinang.

## **METODE**

Metode penelitian dengan menggunakan data sekunder RPJMD kota Tanjungpinang adalah metode penelitian yang menggunakan data yang telah ada dari dokumen RPJMD kota Tanjungpinang sebagai sumber informasi utama. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui apakah RPJMD kota Tanjungpinang telah memperhatikan aspek gender dalam perencanaannya. Metode penelitian ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang apakah RPJMD kota Tanjungpinang telah memperhatikan aspek gender dalam perencanaannya. Selain itu, dengan menggunakan teknik content analysis, peneliti dapat mengukur seberapa besar komitmen pemerintah dalam hal penanganan gender di kota Tanjungpinang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan kota ramah gender sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender di Tanjungpinang. Kebijakan ini dapat membantu mengurangi diskriminasi dan stigma terhadap orang-orang dengan identitas gender yang berbeda, serta memfasilitasi partisipasi aktif wanita dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Tanjungpinang. Selain itu, kebijakan kota ramah

gender juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

Selain itu, kebijakan kota ramah gender juga sangat penting dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Tanjungpinang. Pembangunan yang inklusif dan ramah gender akan membantu menjamin bahwa semua orang di Tanjungpinang dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara adil dan merata, serta membantu menghindari pengurangan kemiskinan dan ketimpangan gender. Secara keseluruhan, kebijakan kota ramah gender sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender di Tanjungpinang dan membantu meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

### **Substansi Kota Ramah Gender**

Kota ramah gender adalah kota yang memiliki berbagai fasilitas dan program untuk meningkatkan kesetaraan gender. Kota ramah gender tidak hanya memiliki standar fisik yang ramah terhadap wanita, tetapi juga memiliki standar sosial, budaya, dan politik yang mendukung kesetaraan gender. Kota ramah gender memiliki beberapa substansi, antara lain:

1. Pendidikan yang inklusif dan bermutu. Kota ramah gender memiliki fasilitas pendidikan yang bermutu dan dapat diakses oleh semua warga tanpa memandang jenis kelamin. Fasilitas pendidikan tersebut harus memiliki standar yang sama untuk semua warga, serta memberikan peluang yang sama bagi semua warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. Pekerjaan yang adil dan sejahtera. Kota ramah gender memiliki fasilitas pekerjaan yang adil dan sejahtera bagi semua warga tanpa memandang jenis kelamin. Fasilitas pekerjaan tersebut harus memberikan gaji yang sama bagi warga dengan kualifikasi yang sama, serta memberikan peluang karier yang sama bagi semua warga.
3. Partisipasi politik yang merata. Kota ramah gender memiliki fasilitas yang memungkinkan semua warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik tanpa memandang jenis kelamin. Fasilitas tersebut harus memperhatikan hak-hak wanita dalam pengambilan keputusan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Perlindungan dari kekerasan. Kota ramah gender memiliki fasilitas yang memungkinkan

wanita yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Fasilitas tersebut harus memiliki standar yang sama untuk semua warga, serta memberikan peluang yang sama bagi semua

### **Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia**

1. Masih tingginya kesenjangan gender dalam hal pendidikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi wanita dalam pendidikan menengah ke atas masih lebih rendah dibandingkan pria. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan dalam hal pekerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Masih tingginya kesenjangan gender dalam sektor pekerjaan. Menurut data BPS, tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja masih lebih rendah dibandingkan pria. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Rendahnya partisipasi politik wanita di Indonesia. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya sekitar 19% dari jumlah anggota legislatif di Indonesia yang merupakan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia.
3. Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap wanita dalam masyarakat. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi diskriminasi terhadap wanita, masih banyak masyarakat yang memandang rendah terhadap wanita dan tidak memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan sektor swasta. Tanpa adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender akan sulit terwujud.

### **Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah alat atau *tools* untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hierarkhinya dengan cara melalui analisis gender.

Analisis Gender, adalah kegiatan melakukan analisis dari perspektif gender dengan pendekatan

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas sumber daya untuk menghasilkan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender adalah suatu ketentuan pengaturan yang:

- mampu mencerminkan substansi pengaturan yang telah mempertimbangkan segala persoalan, kebutuhan, aspirasi dan kepentingan laki-laki dan perempuan, sehingga dihasilkan suatu rumusan norma pengaturan yang responsif gender.
- mengakomodir kebutuhan spesifik gender, berorientasi pada masalah perlindungan dan pemulihan atas praktek ketidakadilan gender baik terhadap laki-laki maupun perempuan dan kelompok rentan yang lainnya;

Kesetaraan Gender adalah suatu keadaan setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup). Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Peran Gender terbagi dalam: 1) Peran Produktif; 2) Peran Reproduksi; dan 3) Peran Sosial Kemasyarakatan/Politik. (*parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan, t.t.*)

## **SIMPULAN**

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan PUG adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Salah satu Target penting dalam kesetaraan gender yaitu Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun melalui indikator Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data

BPS dapat dilihat bahwa indeks pemberdayaan Gender di Tanjungpinang mencapai angka 76,64 ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini Tanjungpinang berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

Selama dua tahun kebelakang data menunjukkan peningkatan indeks keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional khususnya dalam pengambilan keputusan, dan penurunan yg tidak terlalu signifikan pada indeks sumbangan pendapatan perempuan disektor pertanian dan sektor non pertanian terkhusus di Tanjungpinang. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan.. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat. Hal ini akan menciptakan ruang baru bagi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada perspektif perempuan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BAPPENAS. (T.T). Diambil 13 Oktober 2022,

BBC News Indonesia. (T.T.). ‘Panggung Perempuan’, Jalan Jonis Joplin, Dan Penyeberangan Transgender: Cara Kota Wina Mewujudkan Kesetaraan Gender-BBC News Indonesia. Diambil 13 Oktober 2022.

Dp3apm, Kota Tanjungpinang. (T.T.). Kota Tanjungpinang Mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)Tingkat UtamaTahun 2020. Diambil 13 Oktober 2022.

Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2020). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang Dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), Art. 1.

Parameter-Kesetaraan-Gender-Dalam-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan. (T.T.).

Pemberdayaan Manusia Berbasis Gender. (T.T.).

Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221-224.[H](#)